

BAB V

KESIMPULAN

Transmigrasi adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari pulau Jawa yang berpenduduk padat ke wilayah lain yang berpenduduk jarang di luar Pulau Jawa. Namun pengertian transmigrasi telah berkembang menjadi beberapa varian, saat ini misalnya, ada istilah transmigrasi lokal yaitu pemindahan penduduk di dalam suatu pulau baik di pulau Jawa sendiri maupun di luar pulau Jawa. Transmigrasi di Indonesia pertama kali terjadi pada masa kolonial Belanda di tahun 1905 dari Karesidenan Kedu sebagai penduduk yang akan di pindahkan ke daerah Gedongtataan di Distrik Lampung sebagai daerah tujuan.

Perpindahan penduduk ke wilayah Karesidenan Lampung masa Hindia Belanda terbagi dalam tiga sistem dalam kurun waktu berbeda yaitu; sistem yang total dibiayai pemerintah dari tahun 1905 hingga 1911 (setengah waktu dari usulan Heyting yaitu sepuluh tahun), sistem pinjaman bank dari tahun 1912-1928, dan sistem *bawon* dari 1932 hingga 1941. Transmigrasi atau *Kokuminggakari* masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa kolonial Belanda karena masa Jepang pada masa ini perpindahan penduduk dilakukan hanya pada individu yaitu orang yang masih muda dan mempunyai kekuatan fisik dan kebanyakan di antara mereka adalah kaum laki-laki. Sumber dari transmigrasi pada pemerintahan Jepang sangat sedikit, diakrenakan kurang baiknya sistem administrasi dan tidak sebaik pada zaman kolonial Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, transmigrasi dilakukan pada tahun 1947. Masa Orde Baru Transmigrasi menjadi Program pembangunan Lima Tahun (PELITA),

Pelita I kebijakan transmigrasi dikaitkan dengan usaha pembangunan pedesaan, berbeda pada masa-masa sebelumnya yang berfokus pada bagaimana cara mendistribusikan penduduk. Pelita II calon transmigran dikembangkan tidak melulu para petani tetapi kalangan veteran juga mendapat kesempatan melalui program BRN (Biro Rekonstruksi Nasional). Pelita III orientasi transmigrasi adalah persebaran penduduk dan membangun masyarakat baru untuk membantu pembangunan daerah asal dan daerah transmigrasi.

Lahan dibuka untuk tempat tinggal dan perkebunan bagi transmigran di Desa Marga Manunggal Jaya pertama kali tahun 1988 setelah satu tahun kemudian, tempat tinggal untuk transmigran telah selesai. Pada juli 1989 mulai para transmigran berdatangan, calon transmigran berasal dari daerah yaitu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ABRI yang habis dan akan habis masa baktinya serta lokal (putra daerah) yang berjumlah keseluruhan 500 kk. Kantor unit pemukiman transmigrasi (KUPT) dibentuk untuk memberi bantuan bagi masyarakat transmigrasi atau memberi penyuluhan KUPT dan masa lama tugasnya 5 tahun dengan tugas penempatan, sosial-budaya dan sosial-ekonomi.

Transmigrasi Sungai Bahar adalah transmigrasi swakarsa, dimana transmigrasi di Desa Marga Manunggal Jaya pemerintah melakukan kerja sama dengan PTPN VI yang merupakan perusahaan pengolah sawit dengan tujuan juga untuk memberikan pengajaran cara berkebun sawit serta menjadi pembeli hasil sawit tersebut dan bekerja sama dengan bank exim (Bank Ekspor Impor Indonesia) memberikan dana untuk membantu penyediaan lahan.

Desa Marga Manunggal Jaya atau yang lebih di kenal orang unit IV yang awalnya bernama Desa Mukti Tama dihasilkan berdasarkan kesepakatan bersama

KUPT dan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai peran penting, lalu diganti oleh bapak Hasip Kalimudin Syam sebagai Bupati Batanghari memberi nama Desa Marga, namun karena Marga sendiri artinya jalan dalam bahasa Jawa, karena dianggap terputus makanya dibubuhilah Manunggal Jaya yang sebenarnya namanya hanya Desa Marga.

Sebelum dijadikan pemukiman terlebih dahulu suatu areal di lakukan survei lapangan oleh dinas transmigrasi yang bertugas menyediakan areal untuk di tempati masyarakat transmigrasi dengan tujuan untuk menunjukkan kelayakan dan potensi tanah. Prosedur penyediaan tanah harus melalui tiga tahapan yaitu tahap penyediaan areal yang akan dijadikan wilayah penempatan transmigrasi; tahap penelitian dan pengusulan lokasi, tahap ini ditujukan pada daerah-daerah yang sudah di tempati antara 2 sampai 4 tahun tujuannya mengetahui perkembangan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat; tahap terakhir mendapatkan izin dengan bukti mendapat S.K hak pengolahan.

Perubahan sosial masyarakat Desa Marga Manunggal Jaya terjadi secara signifikan pada awal penempatan hingga tahun 2000 yang ditandai dengan berkembang baiknya sektor pendidikan, agama dan budaya. Kehidupan ekonomi Desa Marga Manunggal Jaya dapat dikatakan berkembang pesat dikarenakan hasil panen yang cukup, banyak masyarakat yang mampu untuk merenovasi rumah pemberian pemerintah dan setiap kepala keluarga mempunyai kendaraan bermotor.